

## **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi**

**Riandani Rezki Prana**

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma

[riandanirezkiprana@yahoo.co.id](mailto:riandanirezkiprana@yahoo.co.id)

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (pad) kota tebing tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh pajak, retribusi dan pendapatan asli lain yang sah terhadap PAD di Kota Tebing Tinggi tahun 2001-2012. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi dengan metode Simultan. Pengujian menggunakan Uji statistik meliputi uji t, uji F dan R-square (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik. dimana semua pengujian tersebut menggunakan alat bantu program *Eviews 6.0* dengan data time series tahunan Periode 2001-2012 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Pada model PAD menunjukkan bahwa konsumsi (CONS) berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha = 10$  persen, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha = 10$  persen, dan variabel jumlah penduduk (POP) berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha = 10$  persen dan variabel Retribusi tahun sebelumnya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tebing Tinggi. Model TAX menunjukkan bahwa variabel konsumsi (CONS) berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha = 10$  persen dan variabel pajak daerah tahun sebelumnya (TAX1) berpengaruh positif tapi tidak signifikan pada  $\alpha = 10$  persen. Model RET menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada  $\alpha = 10$  persen, variabel jumlah penduduk (POP) tidak berpengaruh signifikan pada  $\alpha = 10$  persen dan variabel retribusi daerah tahun sebelumnya (RET1) berpengaruh positif dan tidak signifikan pada  $\alpha = 10$  persen. Sedangkan pada model OTHS menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan pada  $\alpha = 10$  persen, variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan pada  $\alpha = 10$  persen

**Kata Kunci:** PAD, Pajak, Retribusi, Konsumsi, PDRB, Jumlah Penduduk

### **Pendahuluan**

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD yang merupakan bagian dari Pendapatan Daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan Total Pendapatan daerah pada APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi lebih pada upaya memanfaatkan

potensi daerah secara optimal. Berlakunya produk hukum mengenai pemerintah daerah tersebut membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena salah satunya perlu kemampuan ekonomi yaitu : pertama, adalah tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan financial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat; kedua, bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Riduansyah (2003), dengan judul "Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah" (Studi kasus pemerintah daerah kota Bogor), dengan tujuan untuk menjelaskan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan menggambarkan kontribusi PAD terhadap APBD Kota Bogor. Undang-Undang No. 33/2004 perubahan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari daerah itu sendiri yang terdiri dari ; (1) hasil pajak daerah, (2) hasil dari retribusi daerah, (3) hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Permasalahan yang sama juga dihadapi pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi dalam hal ini peningkatan pembiayaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang belum maksimal, dengan fokus penelitian tentang pengaruh Pajak, Retribusi dan pendapatan Asli Daerah Sah lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **Tinjauan**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik Daerah, serta pinjaman lain-lain (Widjaja, 2002). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Elita (2002) Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Pengertian pajak daerah ditemukan dalam berbagai literatur maupun dalam Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Daerah, antara lain dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan pengertian Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Geodhart (1982) merumuskan pengertian pajak daerah sebagai berikut: Pajak adalah prestasi yang dipaksakan yang harus diserahkan kepada penguasa publik daerah, menurut norma-norma yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh penguasa publik tanpa adanya kontra prestasi perorangan tertentu sebagai penggantinya. Menurut Kaho (1996), Retribusi Daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara atau merupakan iuran, kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan, dan jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk paksakan disini bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa baik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut.

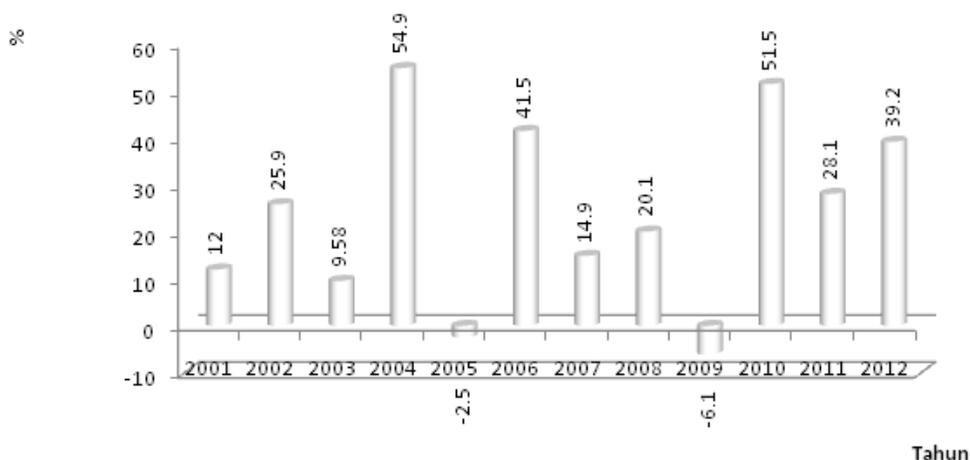
Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan “Lain-lain PAD yang sah” antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan asset daerah. Menurut Sukirno (2004), PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut. Todaro (2003) juga mencatat bahwa pertumbuhan penduduk juga merangsang pertumbuhan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi, selanjutnya akan mendorong *economic of scale* dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi, dan pada akhirnya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi.

## Metode

Penelitian ini menggunakan data BPS Kota Tebing Tinggi periode 2001-2012. Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah Kota Tebing Tinggi dari perspektif kualitas pelayanan dengan menggunakan landasan teori yang baku dan teruji. Jenis penelitian yang dipergunakan ini adalah kausal merupakan tipe konklusif berstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk menentukan hubungan sebab-akibat (hubungan kausal) dari suatu fenomena mengenai situasi yang ada dengan cara mengamati antara variable bebas dan variable terikat dilakukan secara serentak pada individu-individu dari suatu populasi pada suatu saat. Penggalan data berdasarkan data sekunder dan pada waktu berurutan (*times series*) tahun 2001-2012 selanjutnya dilakukan pengujian atas data. Metode analisis data menggunakan analisis simultan, dengan melakukan hipotesa dan asumsi klasik untuk memperoleh fungsi linier yang terbaik dan parameter tidak bias.

## Hasil Penelitian

Perkembangan PAD Kota Tebing Tinggi selama tahun 2001–2012 dapat dilihat pada Gambar berikut:

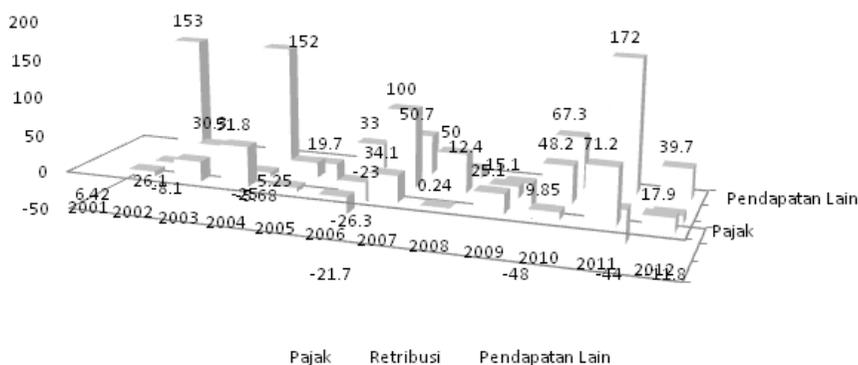


Sumber: BPS Tebing Tinggi  
 Gambar 1. Pertumbuhan PAD Kota Tebing Tinggi Tahun 2001-2012

Nampak pada gambar diatas, Kota Tebing Tinggi telah mampu meningkatkan pertumbuhan PAD sejak tahun 2001-2002 yang sebesar 25.85%, namun pada tahun 2004-2005 mengalami penurunan sebesar -2.52% dikarenakan krisis global yang terjadi pada saat itu. Pendapatan Asli Daerah Kota Tebing Tinggi juga mengalami penurunan kembali pada tahun 2009 sebesar -6.1% dikarenakan kebijakan menaikkan harga BBM yang berdampak pada Pendapatan daerah Tebing Tinggi, tapi kembali naik pada tahun berikutnya. Peningkatan PAD juga terjadi pada tahun 2010 sebesar 51.52% hingga tahun 2012 sebesar 39.19%.

### 1. Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain Daerah

Pajak dan retribusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PAD. Sumber utama PAD berasal dari pajak dan retribusi daerah, disamping pendapatan lainnya. Dalam UU No.34 Tahun 2000 disebutkan bahwa pajak dan retribusi merupakan kewajiban bagi setiap warga sedangkan pendapatan lain diperoleh dari laba dari usaha.

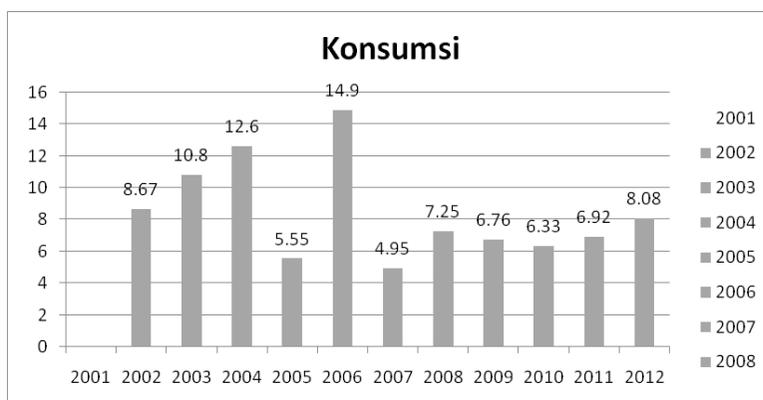


Sumber: BPS Tebing Tinggi  
 Gambar 2. Perkembangan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain Kota Tebing Tinggi Tahun 2001-2012

Gambar diatas menunjukkan perkembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi dan pendapatan lainnya. Dari data tersebut, sumber pendapatan daerah yang terbesar di tahun 2002 bersumber dari PDRB sebesar 8.25% dan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah sebesar 6,41% dan hanya sebesar -8.12% bersumber dari pendapatan lainnya. Di tahun 2010 hingga tahun 2012 sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan sah lain masing-masing sebesar 67,3% di tahun 2010 dan sebesar 172% di tahun 2011 serta mengalami peningkatan di tahun 2012 hingga mencapai 39,7%, dari pajak daerah sebesar 9,85% di tahun 2010 dan mengalami peningkatan di tahun 2011 menjadi sebesar 71,2% dan juga di tahun 2012 terjadi peningkatan pajak daerah yang cukup signifikan yaitu menjadi sebesar 17,9%. Sedangkan pendapatan retribusi sebesar 48,2% ditahun 2010 dan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar -44% dan juga pada tahun 2012 yang hanya menghasilkan -11,8% yang diakibatkan kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik pada taun tersebut.

## 2. Pertumbuhan Konsumsi

Konsumsi masyarakat dalam penelitian ini adalah jumlah konsumsi yang dibelanjakan rumah tangga dari tahun 2001 hingga tahun 2012. Konsumsi rumah tangga di Kota Tebing Tinggi selama tahun penelitian tersebut dideskripsikan melalui Grafik 1

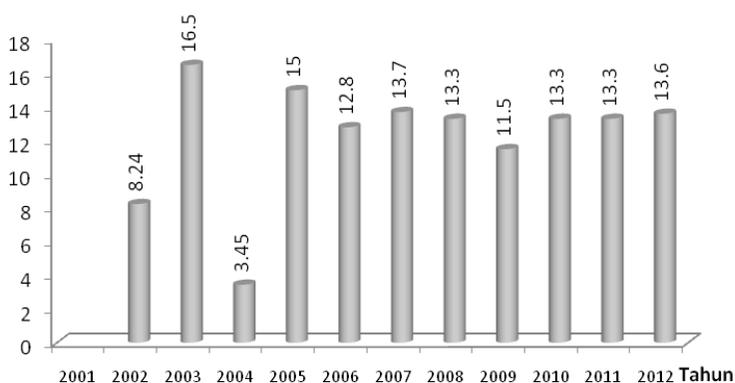


Sumber: BPS Tebing Tinggi  
 Gambar 2. Pertumbuhan Tingkat Konsumsi di Kota Tebing Tinggi 2001-2012

Gambar diatas menjelaskan bahwa selama periode tahun 2001 hingga tahun 2012 menunjukkan perkembangan tingkat konsumsi masyarakat yang semakin meningkat. Pada awal tahun penelitiannya itu tahun 2002 jumlah konsumsi masyarakat Kota Tebing Tinggi sebesar 8,67 %. Peningkatan jumlah konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat, hingga tahun 2012 peningkatan jumlah konsumsi rumah tangga sebesar 8,08%.

### 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDB) yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku. Dimana semua agregat dinilai atas dasar harga tetap yang terjadi pada tahun dasar yang sama, sehingga perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun hanya disebabkan oleh perkembangan riil bukan oleh perkembangan harga.



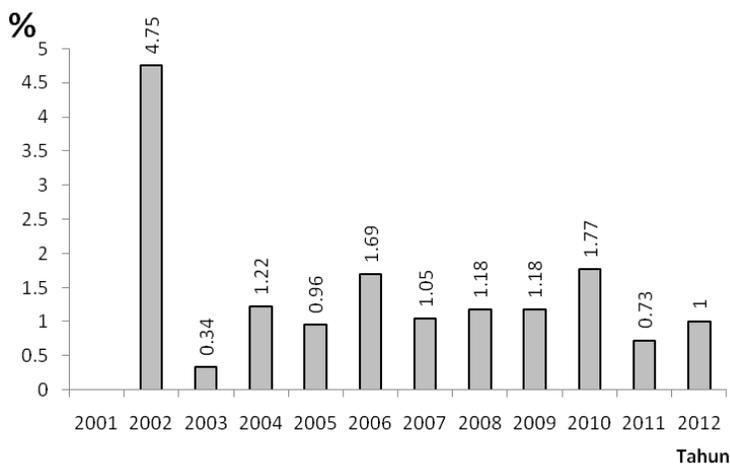
Sumber: BPS Tebing Tinggi  
 Gambar 3. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi Tahun 2001-2012

Tercatat selama periode tahun 2001 hingga tahun 2012 kemajuan perekonomian yang salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau dari pertumbuhan PDRB terus mengalami peningkatan. Gambar diatas menunjukkan perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku di Kota Tebing Tinggi propinsi Sumatera Utara, dimana PDRB di tahun 2002 sebesar 8,24% , yang mana terus mengalami peningkatan yang signifikan, dari tahun 2009 mencapai 11,5%, tahun 2010 hingga tahun 2012 masing-masing sebesar 13% di tahun 2010, sebesar 13,3% di tahun 2011 serta sebesar 13,6% di tahun 2012.

#### 4. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan. Penduduk tidak saja mencakup jumlah, namun termasuk juga komposisi dan distribusinya. Jumlah penduduk yang besar dan kurang seimbang dengan daya dukungan dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu sasaran pembangunan kependudukan adalah meningkatkan kualitas penduduk dan termasuk penyebarannya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera maju dan mandiri.

Jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi tahun 2001 hingga tahun 2012 disajikan dalam tabel 4.5 berikut.



Sumber: BPS Prov. Sumatera Utara

Gambar 5. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Tebing Tinggi Tahun 2001-2012

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi dari tahun 2001 hingga tahun 2012 berkembang dan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2003 PDRB Tebing Tinggi meningkat sebesar 16,5%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi dan modal sumber daya manusia di Sumatera Utara khususnya di Kota Tebing Tinggi cukup menjanjikan jika dikelola dengan bijaksana, sehingga potensi ini dapat menjadi modal pembangunan yang sangat efektif.

### 5. Hasil Estimasi Model PAD

Dalam suatu persamaan simultan, penggolongan variabel tidak bisa dilakukan seperti pada persamaan linier klasik. Suatu variabel dalam suatu persamaan simultan bisa menjadi variabel dependen pada suatu persamaan dan menjadi variabel independen dalam persamaan yang lain.

Tabel 1. Hasil Estimasi Model

System: SYBERLAKU				
Estimation Method: Weighted Two-Stage Least Squares				
Date: 03/07/15 Time: 08:35				
Sample: 2001 2012				
Included observations: 12				
Total system (balanced) observations 48				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(10)	-79.97557	28.95970	-2.761616	0.0094
C(11)	0.265783	0.651819	0.407756	0.6862
C(12)	0.040881	0.024116	1.695154	0.0998
C(13)	0.882563	0.337529	2.614777	0.0135
C(14)	6.836544	3.238789	2.110833	0.0427
C(15)	-0.084354	0.075519	-1.116994	0.2723
C(20)	-15.65909	4.480483	-3.494954	0.0014
C(21)	1.827522	0.216092	8.457148	0.0000
C(22)	0.030127	0.052491	0.573944	0.5700
C(30)	-112.4005	76.13258	-1.476379	0.1496
C(31)	-0.621822	0.807042	-0.770495	0.4467
C(32)	11.71777	7.977573	1.468839	0.1516
C(33)	0.399579	0.257315	1.552881	0.1303
C(40)	-1.226700	92.43313	-0.013271	0.9895
C(41)	-0.448857	8.937450	-0.050222	0.9603
C(42)	1.229002	0.585796	2.098003	0.0439
Determinant residual covariance		3.53E-07		
Equation: LOG(PAD)=C(10)+C(11)*LOG(CONSB)+C(12)*LOG(TAX1)				
+C(13)*LOG(PDRBB)+C(14)*LOG(POP)+C(15)*LOG(RET1)				
Instruments: C LOG(CONSB) LOG(TAX1) LOG(PDRBB) LOG(POP)				
LOG(RET1)				
Observations: 12				
R-squared	0.990966	Mean dependent var	23.33557	
Adjusted R-squared	0.983438	S.D. dependent var	0.722897	
S.E. of regression	0.093033	Sum squared resid	0.051931	
Durbin-Watson stat	3.067766			
Equation: LOG(TAX)=C(20)+C(21)*LOG(CONSB)+C(22)*LOG(TAX1)				
Instruments: C LOG(CONSB) LOG(TAX1) LOG(PDRBB) LOG(POP)				
LOG(RET1)				
Observations: 12				
R-squared	0.857565	Mean dependent var	22.14986	
Adjusted R-squared	0.825913	S.D. dependent var	0.567844	
S.E. of regression	0.236926	Sum squared resid	0.505204	
Durbin-Watson stat	1.357658			
Equation: LOG(RET)=C(30)+C(31)*LOG(PDRBB)+C(32)*LOG(POP)				
+C(33)*LOG(RET1)				
Instruments: C LOG(CONSB) LOG(TAX1) LOG(PDRBB) LOG(POP)				
LOG(RET1)				
Observations: 12				
R-squared	0.760638	Mean dependent var	21.95182	

Adjusted R-squared	0.670877	S.D. dependent var	0.581053
S.E. of regression	0.333346	Sum squared resid	0.888955
Durbin-Watson stat	2.062485		
Equation: LOG(OTHS)=C(40)+C(41)*LOG(POP)+C(42)*LOG(PAD)			
Instruments: C LOG(CONSB) LOG(TAX1) LOG(PDRBB) LOG(POP)			
LOG(RET1)			
Observations: 12			
R-squared	0.903538	Mean dependent var	22.13940
Adjusted R-squared	0.882102	S.D. dependent var	0.923832
S.E. of regression	0.317209	Sum squared resid	0.905594
Durbin-Watson stat	1.898182		

Sumber : Hasil Olah dengan Eviews 5.0

Tabel 4.1 menunjukkan persamaan simultan untuk melihat pengaruh variabel bebas yaitu pajak (Tax), retribusi (Ret) dan pendapatan lainnya (OTHS) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tebing Tinggi.

Pada persamaan I, Hasil estimasi menunjukkan bahwa  $R^2$  untuk persamaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.99 atau 99 persen variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variabel Konsumsi (Cons), variabel Pajak Sebelumnya ( $Tax_1$ ), variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel Jumlah Penduduk (Pop) dan variabel Retribusi Sebelumnya ( $Ret_1$ ). Selebihnya yang 10 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti. Pada model Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa konsumsi (Cons) tidak signifikan pada  $\alpha=10$  persen, variabel Pajak Sebelumnya ( $Tax_1$ ) berpengaruh signifikan  $\alpha = 10$  persen, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan pada  $\alpha=10$  persen, dan variabel jumlah penduduk (Pop) berpengaruh signifikan pada  $\alpha=10$  Retribusi Sebelumnya ( $Ret_1$ ) tidak berpengaruh signifikan pada  $\alpha = 10$  persent terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tebing Tinggi.

Pada persamaan II, Hasil estimasi menunjukkan bahwa  $R^2$  untuk persamaan pajak (Tax) sebesar 0.85 atau 85 persen, variabel pajak (Tax) dapat dijelaskan oleh variabel konsumsi (Cons) dan variabel pajak tahun sebelumnya ( $Tax_1$ ). Selebihnya yang 15 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti. Pada model pajak daerah (Tax), menunjukkan bahwa variabel konsumsi (Cons) berpengaruh signifikan pada  $\alpha=10$  persen dan variabel pajak daerah tahun sebelumnya ( $Tax_1$ ) tidak berpengaruh signifikan pada  $\alpha=10$  persen.

Pada persamaan III, Hasil estimasi menunjukkan bahwa  $R^2$  untuk persamaan retribusi daerah (Ret) sebesar 0,76 atau 76 persen, variabel retribusi daerah (Ret) dapat dijelaskan oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), variabel jumlah penduduk (Pop) dan variabel retribusi daerah tahun sebelumnya ( $Ret_1$ ). Selebihnya yang 24 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti. Pada model retribusi daerah (Ret), menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan pada  $\alpha=10$  persen, variabel jumlah penduduk (Pop) tidak berpengaruh signifikan pada  $\alpha=10$  persen dan variabel retribusi daerah tahun sebelumnya ( $Ret_1$ ) tidak berpengaruh signifikan pada  $\alpha=10$  persen.

Pada persamaan IV, Hasil estimasi menunjukkan bahwa  $R^2$  untuk persamaan pendapatan daerah lainnya (OTHS) sebesar 0.90 atau 90 persen, variabel pendapatan daerah lainnya (OTHS) dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk (Pop) dan variabel pendapatan asli daerah (PAD). Selebihnya yang 10 persen

dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti. Pada model pendapatan daerah lainnya (OTHS), menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan pada  $\alpha=10$  persen, variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan pada  $\alpha=10$  persen.

*Determinant residual covariance* sebesar  $3,53E-07$  menunjukkan bahwa instrumen Pajak Daerah (Tax), Retribusi Daerah (Ret) dan Pendapatan Daerah lainnya (OTHS) secara bersama-sama memberi pengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah (Tax), retribusi daerah (Ret) dan pendapatan daerah lainnya (OTHS) pada  $\alpha= 10$  persen.

## 6. Hasil Uji Asumsi Ekonometrika

### a. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu berdistribusi normal, nilai *Jarque Berra (JB)* dari hasil uji kenormalan pengganggu dibandingkan dengan nilai Tabel *Chi-Square* dengan derajat bebas 2 pada tingkat signifikansi tertentu. Dikatakan lolos dari ketidak normalan distribusi unsure pengganggu apabila nilai *JB* lebih kecil dari nilai kritis Tabel  $\chi^2$ . Uji normalitas dapat dilihat pada nilai *Jarque-Bera Test* pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 2. Deskriptif Statistik

Date: 03/16/15 Time: 20:34				
Sample: 2001 2012				
	RESID01	RESID02	RESID03	RESID04
Mean	7.02E-14	5.77E-14	-1.87E-14	-6.28E-14
Median	-0.049721	0.014752	-0.122320	0.104299
Maximum	0.357741	0.259314	0.951127	0.627626
Minimum	-0.269955	-0.404451	-0.844681	-0.890557
Std. Dev.	0.193423	0.214790	0.594089	0.364905
Skewness	0.559441	-0.295866	0.250215	-0.916251
Kurtosis	2.449456	2.086171	1.859017	4.457072
Jarque-Bera	0.777499	0.592615	0.776136	2.740560
Probability	0.677904	0.743559	0.678366	0.254036
Sum	8.42E-13	6.93E-13	-2.24E-13	-7.53E-13
Sum Sq. Dev.	0.411536	0.507481	3.882363	1.464715
Observations	12	12	12	12

Sumber : Hasil Olah dengan Eviews 5.0

Tabel diatas menunjukkan bahwa residual 01 probability JB = 0.677904, residual 02 probability JB = 0.743559, residual 03 probability JB = 0.678366 dan pada Residual 04 nilai probability JB = 0.254036 lebih besar pada  $\alpha= 10$  persen, artinya residual dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah (TAX), Retribusi Daerah (RET) dan residual Pendapatan Daerah lainnya (OTHS) terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi normalitas.

### b. Uji Autokorelasi

Hasil perhitungan d-statistik atau Durbin-Watson stat untuk kedua model, persamaan perilaku menunjukkan nilai yang lebih kecil pada model persamaan Pendapatan Asli Daerah LOG (PAD) dengan  $R^2$  0,99 sedangkan Durbin Watson bernilai 3,06. Sehingga jika *stochastic term error* adalah non autokorelasi maka penaksiran *variance error* sama dengan nilai varians sebenarnya dan nilai koefisien determinasi tidak terlalu tinggi, sehingga penggunaan uji t-statistik adalah valid atau kesimpulan signifikansi statistik adalah benar.

Pada persamaan Pajak LOG (TAX) menunjukkan nilai DW yang lebih besar dari  $R^2$  yaitu 0.85 sedangkan nilai Durbin Watson stat 1,35 menunjukkan non autokorelasi.

Pada persamaan Retribusi LOG (RET) menunjukkan nilai DW yang lebih besar dari  $R^2$  yaitu 0,76 sedangkan nilai Durbin Watson stat 2,06 menunjukkan non autokorelasi.

Pada persamaan Pendapatan lain yang sah LOG (OTHS) menunjukkan nilai DW yang lebih besar dari  $R^2$  yaitu 0,90 sedangkan nilai Durbin Watson stat 1,89 menunjukkan non autokorelasi.

## 7. Analisis Hasil Estimasi dan Pembahasan.

Hasil estimasi weighted 2SLS menunjukkan bahwa persamaan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah (TAX), retribusi daerah (RET) dan pendapatan daerah lainnya (OTHS) dengan variabel konsumsi (CONS), jumlah penduduk (POP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pajak daerah tahun sebelumnya (TAX1) serta retribusi daerah tahun sebelumnya (RET1) adalah sebagai berikut :

$$\text{Log(PAD)} = C(10) + C(11) * \text{Log(CONSB)} + C(12) * \text{Log(TAX1)} + C(13) * \text{Log(PDRBB)} + C(14) * \text{Log(POP)} + C(15) * \text{Log(RET1)}$$

$$\text{Log(TAX)} = C(20) + C(21) * \text{Log(CONSB)} + C(22) * \text{Log(TAX1)}$$

$$\text{Log(RET)} = C(30) + C(31) * \text{Log(PDRB)} + C(32) * \text{Log(POP)} + C(33) * \text{Log(RET1)}$$

$$\text{Log(OTHS)} = C(40) + C(41) * \text{Log(POP)} + C(42) * \text{Log(PAD)}$$

Persamaan I : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Koefisien regresi Pajak Sebelumnya (TAX1) sebesar 0,04. Ini berarti jika Pajak Sebelumnya naik sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan PAD sebesar 0,04 persen. Sebaliknya, jika Pajak Sebelumnya turun sebesar 1 persen, akan menurunkan PAD sebesar 0,04 persen. Pengaruh Pajak Sebelumnya ini positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen.

Koefisien regresi PDRB sebesar 0,88. Ini berarti jika PDRB naik sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan PAD sebesar 0,88 persen. Sebaliknya, jika PDRB turun sebesar 1 persen, akan menurunkan PAD sebesar 0,88 persen. Pengaruh PDRB ini positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen. PDRB Tebing Tinggi dari tahun 2001-2012 mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap PAD. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka akan mengindikasikan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Saragih, 2003).

Koefisien regresi Jumlah Penduduk (Pop) sebesar 6,83. Ini berarti jika Jumlah Penduduk (Pop) naik sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan

PAD sebesar 6,83 persen. Sebaliknya, jika Jumlah Penduduk (Pop) turun sebesar 1 persen, akan menurunkan PAD sebesar 6,83 persen. Pengaruh jumlah penduduk ini positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen. Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah. Penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat cenderung meningkat.

#### Persamaan II : Pajak Daerah (TAX)

Koefisien regresi konsumsi (CONS) sebesar 1,82. Ini berarti jika Konsumsi Kota Tebing Tinggi naik sebesar 1 persen, akan meningkatkan TAX pada kota tersebut sebesar 1,82 persen. Sebaliknya, jika Konsumsi turun sebesar 1 persen, akan menurunkan TAX sebesar 1,82 persen. Pengaruh Konsumsi ini positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat atau konsumsi akan mempengaruhi Pajak secara signifikan. Konsumsi masyarakat berupa makanan dan non makanan akan dikenakan pajak, baik pajak yang dikenakan pada konsumsi makanan maupun pajak yang dikenakan pada non makanan. Pajak merupakan sumber pendapatan yang terbesar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung jika konsumsi masyarakat meningkat akan meningkatkan pajak daerah dan sebaliknya, jika konsumsi masyarakat menurun maka akan menurunkan pula pajak daerah tersebut.

Salah satu upaya agar konsumsi masyarakat meningkat adalah dengan meningkatkan pendapatan perkapita. Perekonomian yang meningkat dan pengangguran yang rendah serta meningkatnya investasi yang masuk merupakan indikator meningkatnya pendapatan perkapita penduduk suatu wilayah.

#### Persamaan IV : Pendapatan Daerah Lainnya (OTHS)

a. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,22. Ini berarti jika PAD naik sebesar 1 persen, akan meningkatkan OTHS sebesar 1,22 persen. Sebaliknya, jika PAD turun sebesar 1 persen, akan menurunkan OTHS sebesar 1,22 persen. Pengaruh PAD ini positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90 persen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Santosa dan Rahayu, menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi presentasi perubahan PAD adalah Total pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB sangat kuat, hal ini didukung dengan tingkat koefisiensi determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,971. Ketiga variabel independen (Pengeluaran Pembangunan, Penduduk, PDRB), yang mempunyai pengaruh paling besar yaitu variabel penduduk sebesar 8,049.

Yanti, mendapatkan hasil bahwa Kontribusi PAD terhadap APBN selama lima tahun terakhir selalu mengalami fluktuasi. Hasil regresi menunjukkan bahwa kontribusi Komponen PAD yang paling berpengaruh terhadap penerimaan PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan hasil persamaan simultan menunjukkan bahwa peubah bebas yang diduga yaitu pendapatan per kapita, *dummy* pemberlakuan otonomi daerah, jumlah perusahaan, jumlah kamar hotel, jumlah tiap

sepuluh kendaraan bermotor per jumlah penduduk, jumlah izin mendirikan bangunan, jumlah air minum yang disalurkan oleh PDAM per jumlah penduduk dan laba perusahaan riil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PAD pada tingkat kepercayaan 95 %, kecuali pemberlakuan otonomi daerah, dan jumlah air minum yang disalurkan PDAM.

### **Daftar Pustaka**

- Adiatmojo, D. G. (2003). *Pembangunan Berkelanjutan dengan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Membangun Perekonomian Dengan Basis Pertanian Musi Banyuasin*. Jakarta.
- Bastian, I. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salaemba Empat.
- Dewi, E. (2002). *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Medan.
- Gheodart, C. (1982). *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta: Djambatan.
- Kaho, J. R. (1996). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riduansyah, M. (2003). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (APBD) Guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi kasus Pemerintahan Daerah Kota Bogor)*. Bogor.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta.
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga (Delapan)*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Widjaja, H. (2002). *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.